Harian Bhirawa

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2023

Kota Madiun Hal 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Kota Madiun Tentang APBD TA 2024 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. H. Amaya, Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya, di gedung DPRD setempat, Senin (23/10).

Drs. Sugeng, SH, MM, juru Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Madiun pada Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Atas Raperda Kota Madiun Tentang APBD TA 2024, Senin (23/10).

PU Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Kota Madiun Tentang APBD TA 2024

Ketujuh Fraksi Memberikan Saran, Pendapat dan Pertanyaan Kepada Wali Kota Madiun

Kota Madiun, Bhirawa

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Atas Raperda Tentang APBD TA 2024 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun Drs. H. Amaya.

Rapatnya di Juga dihadiri Walikota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya MS dan Forkopimda serta kepala OPD Pemkot Madiun di gedung DPRD setempat, Senin (23/10).

Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun dari tujuh Fraksi: Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS-PAN, Fraksi PSI-Nasdem dan Fraksi Gerindra masing-masing menyampaikan saran, pendapat, pertanyaan kepada Wali Kota Madiun.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juknya Gandhi Handoko, MB menyatakan, pokok-pokok dokumen Rancangan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyatakan perlu untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan Wali Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Mengapa begitu banyak?, Mohon penjelasannya.

Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun melalui juknya, Drs. Sugeng, SH, MM kata menyatakan, pada tahun 2024 tentapat pelaksanaan pilpres, Pileg dan Pilkada serentak yang berlangsung pada pertengahan tahun 2024 tentu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Madiun, khususnya, kawasan, kecamatan dan kelurahan.

Artinya kata Sugeng, Pemerintah Kota Madiun dihadapkan dengan kondisi, mengusahakan secara kemandirian dengan anggaran yang cukup atau sekurang-kurangnya dari kegiatan untuk memacu stimulus-stimulus tersebut serta terus mengupayakan agar sesuai dengan asas yang sudah direncanakan dalam tema pembangunan Tahun 2024 yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan".

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak maka dalam kesempatan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum ini Kami Fraksi Demokrat kota perlu menyampaikan pertanyaan Kepada Terutama Wali Kota.

"Dengan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun disampaikan atas segala perhatiannya di ucapkan terimakasih serta permohonan maaf atas segala kekurangan," ucapnya Sugeng.

Fraksi Partai dengan juknya, Yulianto mengatakan, berkaitan dengan Local Taxing Power dan penataan tata daerah, Fraksi Partai juga memberikan pandangan khusus terhadap tentang kepada daerah yang berkaitan dengan sumber pendapatan yang berpotensi dalam PUA SOPA, yaitu pembagian dalam ketentuan 50 % jasa kios pasar kuliner dan 75% sewa kios bagi yang telah melunasi pembayarannya tahun ini.

Bukan berarti, apakah hal ini tidak dipertimbangkan oleh tim anggaran eksekutif dan Bapeda Daerah Kota Madiun, terhadap rencana dikota dan kelurahan. Fraksi Partai juga akan menyampaikan terkait hal ini.

"Kalau dalam pelaksana, kami kota pernah diajak berdialog terkait hal ini sebelumnya kan. Fraksi Partai juga memberikan saran dan usulan untuk lebih baiknya untuk jawa kios pasar tradisional dipindahkan saja," jelas juknya Partai.

Fraksi PKB dengan juknya, H. Agus Widyono, SH menyampaikan, dalam penyampaian PU Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda Kota Madiun tentang APBD TA 2024, atas terbentuk kekesan Fraksi PKB DPRD Kota Madiun yang perlu lengkapkan pertanyaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut: Dinas Pendidikan Kegiatan, Pengadaan Pendidikan Sebelum Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Anggaran Rp3.255.200.000, Sub kegiatan Honorarium Pelatihan dan Pembina pada sub kegiatan pengelola perlengkapan sekolah menyangkut bantuan? Apa kota sebagai pelaksana Rp10 juta, atau honorarium anggi Wali Kota sebagai pembina kegiatan Rp75 juta apakah termuat dalam belanja sub kegiatan ini.

Dinas Komunikasi Informasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Kota Sub kegiatan Monitoring Opinion/Aspirasi Publik Anggaran Rp1.255.200.000 Keluaran: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Dokumen Dokumen pada Sub kegiatan ini dibutuhkan oleh bidang pada Manfaatkan, Tim, dan pencetakan yang mengharapkan anggaran sebesar Rp1.005.000.000.

Anggi selaku Sekretaris PP Dinkominfo, Dinas Kesehatan Sat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Ketenaga Kerja dan Perlindungan, DPUPR, hendaknya kegiatan sub kegiatan dan anggaran untuk lebih efisiensi.

"Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKB, disampaikan pula mendapat jawaban bagaimana mestinya dari atas segala perhatian dukungan terima kasih, serta pemahaman maaf atas segala kekurangan," ungkapnya.

Fraksi PKS-PAN dengan juknya dr. Indah Sri Rahmawati mengatakan, dengan adanya penyusun KRPPA menurut APBN tahun 2024, pada tanggal 21 September 2023, maka Fraksi PKS-PAN perlu, memberikan pertanyaan, apakah dalam pembuatan konsepsi dana tersebut, pemerintah Kota Madiun telah menyusunnya dengan dengan pendapatan dari pemerintah pusat berdasarkan APBN 2024 tersebut ? Mohon Penjelasannya !

Fraksi PSI-Nasdem dengan juknya, F. Bagas Pendowo mengatakan, sebelum menyimak Nota Keuangan tentang APBD TA 2024 yang disampaikan Wali Kota, dan melanjutkan dokumen rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Madiun, serta mempertimbangkan beberapa aspek anggaran dalam, Fraksi PSI-NasDem DPRD Kota Madiun ingin menyampaikan tanggapan terhadap program strategis nasional tahun 2024.

Yaitu : 1. Penghapusan kemiskinan ekstrim, 2. Pencegahan dan penurunan stunting, 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 4. Pengembangan infrasi daerah. Dengan adanya program ini, Program kegiatan anggaran yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mendukung program strategis nasional tersebut ?.

"Demikian pandangan umum Fraksi PSI-NaDem DPRD Kota Madiun ini kami sampaikan guna mendapatkan penjelasan dan tanggapan dari Wali Kota Madiun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, serta permohonan maaf atas segala kekurangannya," pungkasnya.

Fraksi Gerindra melalui juknya, Suwarti Widodo menyatakan, pada 2024 diperkirakan pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar 1,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Adapun berdasarkan indikasi daerah mengalami penurunan sekitar 2% yang mencerminkan adanya tantangan dalam pengumpulan pendapatan di masa yang akan mendatang.

Kemudian untuk Pendapatan Lain yang sah juga mengalami penurunan sekitar 19 %. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab penurunan 2% pada target realisasi daerah dan PAD yang sah mencapai 19 % dalam APBD 2024 ? Dan apakah Pemerintah Kota Madiun memiliki strategi khusus untuk mengatasi penurunan tersebut dan memajuan dari Rasa pendapatan daerah ?

Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun selaku pimpinan sidang, Drs. Istono M.Pd menyatakan, akan memberikan kesempatan kepada eksekutif yaitu Wali Kota Madiun untuk menyampaikan jawaban terhadap Pandangan APBD Tahun Anggaran 2024.

"Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap Rancangan APBD TA 2024 oleh Komisi dan Badang Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun," kata Istono.

Kepada awak media usai sidang, mewakili yang kota Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun ini, mengatakan, kalau sidang tersebut akan berkaitan Rancangan APBD TA 2024 paling lambat akhir Nopember 2024 mendatang.

"Maksudnya dalam tahun harus sudah berlaku satu bulan sebelum akhir tahun 2024 mendatang. Yakni dipertengah akhir Nopember 2024 mendatang mayor. Artinya sudah dua bulan kan. Kalau ini kami bahasa mulainya supaya untuk mempersiapkan RAPBD 2024 tersebut," tangkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi kepada awak media usai sidang mengatakan penyampaian APBD 2024 mengacu pada APBD sebelumnya.

Maksudnya untuk dana transfer pusat. Sebab, APBN 2024 masih belum dikeluarkan pemerintahan. Artinya, transfer pusat untuk daerah juga belum bisa diadakan bersamanya. Maksud, wali Kota Maidi contoh dana transfer pusat akan meningkat.

Namun Wali Kota Maidi berharap pertanyaan dari fraksi tersebut akan dijawab wali kota maidi sidang paripurna agenda selanjutnya. Namun sebelumnya kami akan mengundang untuk bertemu bersama dengan tim anggaran Paripurna dengan agenda selanjutnya mempersiapkan pada 2 November mendatang. [dbt.adh]